

**KIAI DAN POLITIK: MENGINTIP MOTIF KIAI NU (NAHDLATUL
ULAMA) DALAM PEMILU 2009
DI GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI**

H. Sadi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Banyuwangi

ABSTRACT

Kiai involvement in Indonesian politics is an integral part in the history of Indonesian politics. Affirmation political role Kiai increasingly finding space and form institutionalized when Jam'iyah Nahdlatul Ulama was founded in 1926. The accumulation of social and economic status, coupled with the extent of religious knowledge, making Kiai as a charismatic leader who respected in society so that a Kiai become a reference source in every issue that society confronted. The authorized capital of which are owned Kiai is the theological legitimacy, where the figure Kiai regarded as the heir to the Prophet (Al Ulama 'Warasatul An Biya'). It is not surprising then that is a very strategic position it became the basis of confirmation of the legitimacy and role in society Kiai. In this study seeks to explain the diversity of political attitudes Kiai and also to answer the motive behind Kiai involved in Election Year 2009 in Glenmore District Banyuwangi, to determine the political role Kiai in the General Election of 2009.

Keywords: *kiai, politics, elections*

ABSTRAK

Keterlibatan Kiai dalam politik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah politik Indonesia. Peneguhan peran politik Kiai semakin menemukan ruang dan bentuk yang terlembaga ketika Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926. Akumulasi dari status sosial dan ekonomi, ditambah dengan luasnya pengetahuan keagamaan, menjadikan Kiai sebagai pemimpin karismatik yang disegani di masyarakat sehingga seorang Kiai menjadi sumber rujukan dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Modal dasar lain yang dimiliki Kiai adalah *legitimasi teologis*, dimana sosok Kiai dianggap sebagai sosok pewaris para Nabi (*Al Ulama' Warasatul An Biya'*). Maka tidak heran kemudian posisi yang sangat strategis ini menjadi basis peneguhan legitimasi dan peran Kiai di masyarakat. Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan beragamnya sikap politik Kiai dan juga untuk menjawab motif yang melatarbelakangi Kiai terlibat pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Kecamatan Glenmore Banyuwangi, untuk mengetahui peran politik Kiai dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Kata kunci: *kiai, politik, pemilu*

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat Jawa, Kiai memainkan peran yang lebih dari sekedar seorang guru. Dia sekaligus bertindak sebagai seorang pemimpin spiritual bagi masyarakat. Memimpin kegiatan-kegiatan spiritual dan ritual ritual dalam masyarakat. Bahkan sejumlah Kiai diyakini memiliki penglihatan batin dan kesaktian tertentu, mereka bertindak sebagai orang yang dapat melakukan penyembuh spiritual dan mengusir roh jahat, membuat jimat-jimat atau mengajarkan berbagai teknik kekebalan tubuh. Bahkan dalam tradisi masyarakat Jawa. Kiai di anggap sebagai perantara antara dunia ini dengan dunia arwah, berbagai ritual misalnya tahlilan, slametan yang pahalanya dipersembahkan kepada arwah almarhum. Ziarah dan tahlilan tidak harus menghadirkan Kiai, tetapi dipercaya akan lebih afdol jika dipimpin seorang Kiai (Bruinessen, 1999:22-23). Interaksi melalui jalur-jalur yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti inilah yang menjadikan Kiai memiliki pengikut yang setia, dan dalam posisi ini Kiai dapat dengan mudah untuk memanfaatkannya untuk menopang kiprah sosial politiknya.

Peran sosial politik Kiai semakin menemukan kiprah yang lebih meluas ketika pelembagaan Kiai dan pondok pesantren dalam wadah Nahdlatul Ulama. Karena pada dasarnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan segala macam aktivitas politiknya merupakan representasi dari kiprah politik Kiai dalam kancah politik. Bentuk hubungan Kiai dengan Nahdlatul Ulama dapat disederhanakan dengan bentuk hubungan fungsional. Hubungan timbal balik secara fungsional terbukti dari kebutuhan Kiai terhadap Nahdlatul Ulama dan kebutuhan organisasi Nahdlatul Ulama terhadap kebutuhan Kiai, sehingga antara Kiai dan organisasi Nahdlatul Ulama merupakan dua bagian yang tidak bisa terpisahkan (Ummatin, 2002 : 36)

Besarnya modal sosial yang dimiliki seorang Kiai dalam masyarakat, tidak lantas membebaskan Kiai tudingan-tudungan yang meragukan kemampuan Kiai dalam politik. Clifford Geertz (dalam Suprayogo, 2007:20) dalam studinya di Mojokerto memberikan kesimpulan bahwa pengaruh Kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar budaya. Ia beranggapan bahwa secara politis Kiai

tidak berpengalaman dan tidak mempunyai keahlian, tak mampu memimpin masyarakat bangsa yang modern dengan baik.

Keterlibatan Kiai dalam politik praktis, sampai sejauh ini memang terjadi tarik-menarik pendapat, antara kelompok yang mengabsahkan Kiai berpolitik dengan kelompok yang menentang dengan keras Kiai terlibat dalam politik. Kelompok pertama mengasumsikan bahwa Kiai bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik seperti halnya warga Negara yang lain. Sedangkan kelompok yang kedua mengkritik dengan keras, berdasarkan asumsi bahwa keterlibatan Kiai dalam politik lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan yang bisa didapatkan. Hal ini berkaitan dengan realitas politik yang oleh banyak kalangan dianggap “kotor”. Sehingga ketika Kiai dan pesantren terlibat dalam politik akan terseret kedalam dunia yang “kotor” pula.

Munculnya perbedaan pendapat tentang bagaimana peran politik Kiai di masyarakat, menjadi isu yang *debatable* dan tak akan pernah selesai. Masing-masing akan terus menerus memperkuat argumentasi kelompoknya. Meskipun terdapat kontroversi yang berkepanjangan mengenai keterlibatan Kiai dalam Politik, sesungguhnya keterlibatan Kiai dan pesantren tidak dapat dihindari. Intensitas Kiai dan bentuk keterlibatan Kiai dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dapat dilihat melalui keterlibatan Kiai dalam momen-momen politik yang penting seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)

Godaan materi dalam sistem politik liberal sebagaimana dianut di Indonesia menjadi medan ujian yang tidak mudah bagi Kiai. Hal ini berkaitan dalam politik liberal, interaksi-interaksi politik tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pemahaman keagamaan semata, karena juga berkaitan dengan tawar menawar (*bargaining*) kepentingan yang bersifat ekonomi. Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik sebagaimana digambarkan di atas dapat dilihat pada tiga kemungkinan. Pertama, terdapat hubungan kausalitas antar

ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik determenistik.

Gempuran dan godaan kepentingan-kepentingan pragmatis sesungguhnya telah menyeret sebagian para kiai ke dalam ruang konflik dan semakin menjauh dari peran sosial di masyarakat. Politisasi agama seringkali terdengar nyaring pada saat kampanye. Fatwa dan tafsir para kiai tidak lagi didasari oleh pemahaman yang para Ulama terdahulu yang dapat dijadikan rujukan bagi umat untuk menentukan sikap, namun lebih banyak dilatar belakangi oleh motif kalkulasi politik sebagai bagian dari politik dagang sapi.

Beragamnya sikap politik Kiai yang terjadi menunjukkan bahwa keterlibatan Kiai dalam politik didorong oleh motif yang beragam. Motif disini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam diri Kiai sendiri, Pesantren atau bahkan dari luar, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Mencoba memahami motif keterlibatan Kiai dalam politik, bukanlah persoalan yang mudah. Disini kita akan memasuki ruang subjektif Kiai dan dorongan dirinya terlibat dalam politik.

Menurut Thaba (1996:334) yang menyampaikan terdapat beberapa perbedaan tipologi Kiai, setidaknya terdapat empat perbedaan sikap politik yang terjadi di kalangan politisi Islam. Pertama, kelompok yang berpandangan pragmatis dan cenderung mengintegrasikan diri dalam kekuasaan serta meninggalkan label ideologisnya. Kedua, kelompok akomodatif yakni kelompok yang pemikiran dan sikap politiknya reseptif dan kompromis, namun tidak selalu berintegrasi. Ketiga, kelompok transformatif, yaitu kelompok yang memiliki komitmen perubahanyang mendasar tapi menolak cara-cara radikal. Keempat, kelompok prinsipalis adalah kelompok yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar Islam. Pendapat hampir sama disampaikan Ali Maschan Moesa, memberikan penggolongan tipologi Kiai juga berdasar atas konstruksi Kiai dalam memaknai Nasionalisme, antara lain Kiai Fundamentalis, Kiai Moderat dan Kiai Pragmatis. (2007:309-310).

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa politik Kiai dan dinamika kiprahnya selalu memiliki ruang dan perspektif baru untuk dikaji. Terdapatnya

perbedaan-perbedaan pendapat mengenai peran politik menunjukkan bahwa politik Kiai masih cukup relevan untuk dikaji. Berkaitan dengan penelitian ini pada Pemilu 2009, di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi peran politik Kiai juga tidak lepas dari persoalan-persoalan yang mempertanyakan peran politik Kiai dalam politik termasuk yang mempertanyakan motif dibalik keterlibatan Kiai dalam Politik.

Di Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, keterlibatan Kiai dalam politik merupakan sesuatu yang tidak asing. Hiruk pikuk euphoria politik pasca Orde Baru tumbang membuka ruang bagi Kiai untuk berkiprah dalam politik. Ketika PBNU memfasilitasi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai di Kecamatan Glenmore berbondong-bondong berpartisipasi aktif dalam wadah Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan ketika konflik dan terbelahnya dukungan partai politik yang berbasis masa Nahdlatul Ulama terjadi, ternyata rembesan konflik politik di Tingkat Nasional juga terjadi di Kecamatan Glenmore.

Henggangnya Kiai dan politisi yang telah membesarkan PKB ke PKNU atau justru memilih ke lain partai adalah keadaan politik yang mewarnai keadaan politik pada tahun 2009 di Kecamatan Glenmore. Rivalitas dua partai yang berbasis masa NU ini seringkali menjadi bentuk persaingan yang tidak sehat. Kondisi riil ini sebenarnya merupakan representasi dari rivalitas yang terjadi di tingkat Nasional.

Keterbelahan dukungan Kiai, antara tetap bertahan di PKB, atau memilih PKNU, atau bahkan memilih partai diluar keduanya adalah sebuah keniscayaan. Konflik internal yang berkepanjangan dalam PKB adalah pintu masuk tercerai berainya pilihan politik Kiai dalam Pemilu 2009. Selain faktor-faktor institusional yang kurang kondusif pilihan-pilihan politik Kiai juga tidak lepas dari beragamnya motif dan tujuan para Kiai terlibat langsung dalam politik praktis. Perbedaan afiliasi politik Kiai dalam politik sebagian didasari atas pilihan-pilihan yang sangat mendasar dan ideal, namun adapula yang berdasarkan hitungan-hitungan rasional bahkan juga dilatar belakangi oleh ambisi politik semata, *vested of interest* serta tidak lepas dari tarik menarik kepentingan duniawi serta hal-hal yang bersifat profan lainnya.

Pengungkapan motif dan tujuan Kiai berpolitik menjadi ruang yang harus diungkap untuk mendapatkan pemahaman yang utuh atas Peran Politik Kiai dalam Pemilu 2009. Berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan rumusan masalah yaitu Apakah motif yang melatar belakangi Kiai terlibat pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang ada pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif yang melatar belakangi Kiai terlibat pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi Bagi Nahdlatul Ulama penelitian tentang motif politik Kiai dalam pemilihan umum tahun 2009 diperoleh gambaran riil bahwa Kiai sebagai aktor utama dalam Organisasi NU dan sebagai manusia biasa juga memiliki motif tertentu dan subjektif dalam keterlibatannya dalam kehidupan politik. Bagi Kiai sendiri peran politik dan perilaku politik Kiai dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dan peran politik yang dimainkan oleh Kiai digunakan sebagai rujukan meneguhkan jatidiri Kiai sebagai institusi yang memiliki otoritas tinggi sebagai penerus perjuangan para nabi.

KAJIAN TEORI

Kiai, Pesantren dan Nahdlatul Ulama

Istilah Kiai digunakan secara luas dalam komunitas muslim Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, banyak yang menganggap sebagai Ulama, satu istilah yang merujuk pada gelar untuk ahli agama dalam tradisi sunni (Tholkhah, 2001:77) Kiai bisaanya memiliki kharisma dan pada umumnya memimpin sebuah pondok pesantren, mengajarkan kitab-kitab klasik (kitab kuning) dan memiliki keterikatan dengan kelompok Islam tradisional (Dhofier, 1986:55). Secara etnografis istilah *Kiai* merupakan istilah lokal, yaitu untuk masyarakat Jawa, tetapi secara terminologis dan kultural sama dengan istilah ajengan, buya, dan sebagainya. Kesemuanya adalah panggilan lokal untuk ulama (Suprayogo, 2007:57).

Ditinjau dari sudut sejarahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (1995: 138) bahwa Pesantren yang merupakan “Bapak” dari pendidikan Islam di

Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da'i.

Dari berbagai keontetikan dan kebertahanan pesantren, KH. Said Aqiel Siradj berkesimpulan bahwa pesantren itu tidak terlepas dari *al-mas'uliyah al-arba'ah* (empat kapabilitas), yaitu pertama, *mas'uliyah aldiniyah (religion capability)* yang di implementasikan dalam kiat pesantren untuk memperjuangkan *da'wah Islamiyah* yang berarti sebagai tumpuan harapan pemecahan semua *masail al-diniyah*. Kedua, *al-mas'uliyah al-tsaqafiyah (educational capability)* yang lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan umat. Ketiga, *al-mas'uliyah al-amaliyyah (praticce capability)* yang lebih mengutamakan pada realisasi hukum Islam/syariat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial-masyarakat. Keempat, *al-mas'uliyah al-qudwah (moral capability)* yang lebih memusatkan pada perilaku akhlak al-karimah. (Siradj: 2007: 51).

Pola hubungan yang menggambarkan adanya interaksi antara Kiai pesantren, jaringan institusi pesantren dan jaringan NU, dapat dilacak dari peristiwa sejarah yang menempatkan persoalan agama, ideologi, kultural dan politik menjadi pertimbangan penting berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (Ummatin, 2002:99). Basis Nahdlatul Ulama adalah pesantren, suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan dan mewariskan ajaran *ahli sunnah wal jama'ah* dengan penekanan pada metode pendidikan yang tradisional berupa pengulangan dan memorisasi sumber-sumber ajaran agama yang menjadi *standardnya* (Ida, 2004:1).

Secara etimologi kata *pesantren* berasal dari kata santri yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran – an yang berarti tempat tinggal para santri. Lebih lanjut Prof Jahus berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji (Sasono, 1998: 106). Sedangkan CC Berg dalam Hasjim istilah tersebut berasal dari bahasa 'shastri' yang dalam bahasa india berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu (Hasjim, 1992:6).

Sedangkan menurut Moesa (2007: 93-95), pesantren adalah institusi pendidikan yang berada di bawah pimpinan seorang Kiai atau beberapa Kiai dan dibantu oleh sejumlah santri senior dan beberapa anggota keluarganya. Pesantren menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang Kiai sebab ia merupakan tempat bagi sang Kiai untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran, tradisi dan pengaruhnya di masyarakat.

Pesantren telah lahir jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir, lembaga pendidikan ini lebih tua beberapa abad ketimbang Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, ketika Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926, pesantren-pesantren secara alamiah seolah-olah menjadi "milik" Nahdlatul Ulama dan menjadi tempat bertumbuh kembangnya para ulama yang kader Nahdlatul Ulama. Pada akhirnya, pesantren hampir identik dengan Nahdlatul Ulama. Lebih jauh lagi KH. Muchith Muzadi menyampaikan bahwa pesantren-pesantren, terutama yang terletak di daerah pedesaan, adalah "NU Kecil" yang menjadi basis kekuatan Nahdlatul Ulama besar (NU Jam'iyah). Kiai, ustad dan santri dan berbagai unsur lain dalam pesantren merupakan unsur penentu kekukuhan dan kekokohan Nahdlatul Ulama sepanjang sejarah (Sutarto,2002:82).

Sedangkan Farid Masdar Mas'udi (2013) menganalogikan hubungan Nahdlatul Ulama dan pesantren dengan mata air dan sawah yang saling membutuhkan. Pesantren senantiasa menjadi mata air kearifan dan ilmu keagamaan orang NU, sementara masjid adalah sawah atau ladang gerakan dan pengamalan ajaran agamanya (www.nu.or.id, diakses 10 Mei 2013).

Keterlibatan Kiai dan Pesantren dalam Politik

Melacak keterlibatan Kiai Pesantren dalam politik bukanlah merupakan persoalan yang terlampau sulit, mudahnya pelacakan peran politik Kiai dalam dunia politik, sebangun dengan pelacakan peran Nahdlatul Ulama di dalam politik karena organisasi ini merupakan organisasi ulama-ulama tradisional, hal ini berkaitan dengan operator dari semua gerakan yang ada didalam organisasi Nahdlatul Ulama adalah Kiai itu sendiri. Bahkan Nakamura dalam Dirdjosanjoto NU dikatakan adalah sebuah konfederasi horizontal atau suatu aliansi

kesetiakawanan para ulama yang otonom bukan hierarki yang monolitik dan tersentralisasi. (Dirdjosanjoto, 2013:231)

Persinggungan ulama / Kiai tradisional dengan politik, sesungguhnya bisa dilacak, paling tidak dimulai sejak jaman kesultanan Mataram II di Jawa (Martono,1968:84 ; Kartodirjo,1973; Dirdjosanjoto,1994:17-18) dalam Suprayogo (2002:2). Di luar unsur pejabat resmi agama yang resmi ini, masih terdapat ahli-ahli agama yang tidak menduduki jabatan resmi dan berada diluar birokrasi. Mereka adalah para Kiai, guru tarekat, dan haji yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Mereka merupakan ulama independen yang mata pencahariannya tidak bergantung pada pengangkatan penguasa (Dirdjosanjoto, 2013: 40)

Pasca berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, secara institusional, organisasi Nahdlatul Ulama mulai memiliki keinginan untuk terlibat dalam politik. Pada saat Nahdlatul Ulama melaksanakan Mukhtamar ke-13 di Menes, Banten, terjadi kegemparan karena ada usul supaya Nahdlatul Ulama menempatkan seorang wakilnya dalam Volkraad (Dewan Rakyat).Usul tersebut dianggap sebagai munculnya hasrat dan paham politik dilingkungan anggota Nahdlatul Ulama. Oleh peserta kongres usul tersebut ditolak dengan 54 suara melawan 4 suara, dengan alasan bahwa Nahdlatul Ulama hanya bergerak dalam bidang agama dan pendidikan serta tidak mencampuri urusan politik (Aboebakar,1957: 489).

Nahdlatul Ulama terlibat dalam MIAI, bahkan beberapa tahun sebelum berdiri keterlibatan Kiai tradisional yang bersinggungan dengan politik sudah bisa dilihat ketika Kiai Wahab mengorganisir Islam tradisional sebuah tantangan dalam skala politik lokal, nasional bahkan Internasional sekaligus, berkaitan dengan berkembangnya organisasi Islam modern yang mulai mengancam eksistensi amaliyah yang dilakukan oleh ulama tradisional dan masyarakat, sehingga oleh banyak kalangan bahwa kelahiran NU merupakan bagian dari pola umum reaksi anti-pembaharu (Van Bruinessen, 1999:28).

Berawal dari pengaruh berkembangnya Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi Kiai di masyarakat, yang

sebelumnya merupakan satu-satunya pemimpin dan juru bicara komunitas muslim, dan ajaran ajaran pembaharu sangat melemahkan mereka. Dikatakan selanjutnya bahwa Nahdlatul Ulama lahir untuk mewakili kepentingan-kepentingan Kiai, vis a vis pemerintah, kaum pembaharu dan untuk menghambat perkembangan organisasi-organisasi yang hadir lebih dahulu.

Respon ulama tradisional sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama adalah ketika pada akhir Tahun 1910-an seorang ulama asal Minangkabau yang bernama Faqih Hasyim yang menetap di Surabaya terlibat secara aktif dalam menyebarkan ajarannya di Jawa, yang selanjutnya memancing respon yang sangat keras dari kalangan ulama tradisional di Surabaya. Hingga pada akhirnya ulama tradisional mendirikan sebuah sekolah agama, yang diberi nama Taswirul Afkar. Pada tahun 1924, yang digunakan sebagai reaksi langsung terhadap propaganda Faqih Hasyim. Taswirul Afkar hingga saat ini diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. (Van Bruinessen, 1999: 26-27).

Perlakuan tidak adil kepada ulama tradisional dirasakan pada saat adanya undangan Raja Ibnu Saud penguasa baru Tanah Hijaz untuk membicarakan masalah “khilafah” pada tahun 1924 di Kairo Mesir. Untuk memenuhi undangan tersebut umat Islam sendiri telah mempersiapkan diri dengan mendirikan komite hijaz yang di ketuai Wondoamiseno (SI) dan Wahab Hasbullah (Tradisionalis), kemudian memilih delegasi yang akan berangkat antara lain: Soerjopranoto (SI), H.Fachruddin (Muhammadiyah) dan Wahab Hasbullah (Tradisionalis) namun pada akhirnya Kongres tersebut diundur, dan perhatian berpindah ke Hijaz dimana Penguasa Baru tanah Hijaz yaitu Raja Ibnu Saud juga menyelenggarakan Kongres serupa dan keputusan yang dirasakan tidak adil dimana akhirnya delegasi yang berangkat adalah Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansur (Muhammadiyah) (Bruinessen, 1999:33).

Untuk membujuk para Kiai yang lebih berpengaruh dan akhirnya untuk menjadikannya, Kiai Wahab memerlukan dukungan moral dari orang yang lebih berwibawa secara keagamaan. Kiai Hasyim As'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, pada waktu itu diakui sebagai Kiai yang sangat dihormati di Jawa, tanpa dukungan Kiai Hasyim jelas tidak mungkin berdiri sebuah organisasi Kiai

yang solid. Rapat di kediaman Wahab Hasbullah yang kemudian dianggap sebagai rapat pembentukan Nahdlatul Ulama, dipimpin Kiai Hasyim sendiri akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926 terbentuklah organisasi ulama tradisional yang diberi nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama (Bruinessen, 1999:37).

Berdasarkan paparan di atas khususnya yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama terdapat pengumpulan anatara kepentingan keagamaan pelestarian pengamalan keagamaan Islam Ahlisunnah Wal Jama'ah dengan perkembangan politik yang sedang terjadi, baik dalam politik lokal, nasional maupun Internasional yang pada akhirnya memberikan kesan bahwa Kiai adalah bagian dari masyarakat yang tidak pernah berhenti bersinggungan dengan persoalan yang dihadapi umat baik dalam skala lokal, nasional bahkan Internasional. Dengan demikian sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama melihat latar belakang sejarah Nahdlatul Ulama faktor politik telah menyertai alasan alasan ideologis berdirinya organisasi ulama tradisional yang ada di Indonesia.

Fathurin Zen menjelaskan keterlibatan NU dalam politik sebenarnya berawal keterlibatan Nahdlatul Ulama dalam MIAI, dalam arti bahwa organisasi ini dibawa untuk menentukan sikap dan posisinya terhadap penguasa Belanda menjelang Perang Dunia II. Meskipun sebelumnya, tahun 1930-an, pernah ada usaha untuk mengadakan Kongres Al Islam, seperti di Malang tahun 1932, akan tetapi kongres tersebut didominasi SI dan Muhamaddiyah, sedangkan Nahdlatul Ulama hanya menjadi penonton (Zen, 2004: 26). NU baru bergabung dengan MIAI setelah merasa yakin kaum pembaharu tidak mendominasi penggabungan baru ini, seperti yang terjadi pada kongres kongres Islam tahun 1920 an (Anam, 1985:74-96).

Keterlibatan Kiai dan Nahdlatul Ulama dalam dunia politik semakin besar pada saat Nahdlatul Ulama berubah menjadi partai politik dan memutuskan hubungan organisatoris dengan partai Masyumi. Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa Partai Nahdlatul Ulama yang ditopang oleh Kiai pesantren dengan kharismanya menjadi kekuatan yang diperhitungkan, dan Kiai pesantren dengan berbagai macam keistimewaannya menjadi senjata ampuh untuk mendulang perolehan suara Nahdlatul Ulama, ketika menjadi Partai Politik. Tahun

1955 sampai dengan Tahun 1971 adalah bukti bahwa peran politik Kiai mampu memobilisasi massa hingga menghantarkan Nahdlatul Ulama menjadi partai yang cukup besar di Indonesia.

Dalam pemilu 1977 ketika Nahdlatul Ulama berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan, kekuatan Nahdlatul Ulama masih memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan partai berlambang Ka'bah tersebut. Hubungan kurang harmonis dengan pemerintah orde baru, yang berimplikasi terjadinya marginalisasi peran politik Kiai ditubuh partai menandai menyusutnya peran politik Kiai Nahdlatul Ulama, yang mengakibatkan munculnya aksi penggemosan oleh beberapa Kiai Nahdlatul Ulama yang membuat perolehan suara PPP terpuruk dalam Pemilu 1982 dan 1987. Baru pada pemilu tahun 1992, ketika Kiai kembali diberi angin untuk berkiprah, perolehan suara PPP gemuk kembali. Bahkan di beberapa daerah suara PPP mengungguli Golkar (Suprayogo, 2007:35).

Keterpurukan Suara PPP pada tahun 1982 dan 1987 sebenarnya merupakan efek dari sikap politik Nahdlatul Ulama yang memilih untuk kembali pada jati diri asalnya yang tercermin dalam kembali ke Khittah 1926, dimana dalam Muktamar Nahdlatul Ulama 1982 di Situbondo, perumusan tentang Khittah 1926 dirumuskan. Walaupun Khittah NU 1926 baru diformalkan pada tahun 1982, arah kebijakan politik Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan politik praktis sudah pernah disuarakan, tak lama sebelum Muktamar 1979. Adalah KH. Achmad Siddiq yang menerbitkan sebuah buku kecil berisi rumusan kembali ke Khittah 1926.

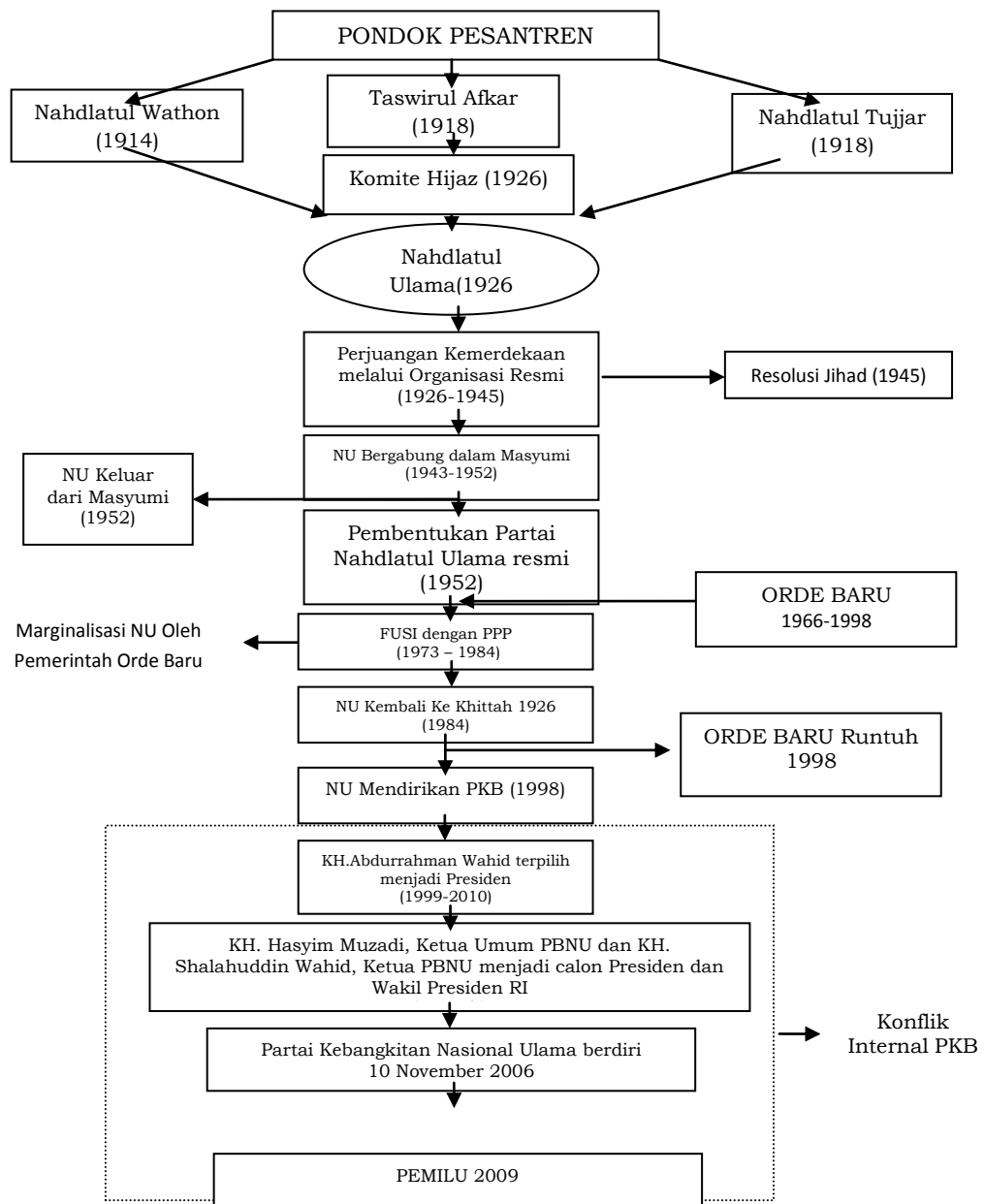
Dalam uraiannya Kiai Achmad Siddiq mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan sebagai organisasi yang semata-mata bersifat keagamaan dan partisipasinya dalam politik praktis hanyalah selingan yang telah berakhir pada tahun 1973, Nahdlatul Ulama sudah melepaskan aktivitas politik praktisnya dan dilimpahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan, kembali menjadi Jam'iyah Diniyah seperti pada zaman dia dilahirkan (Siddiq, 2005:8).

Tahun 1987 merupakan tahun pertama implikasi kembali ke Khittah 1926 dipertaruhkan dan diuji. PBNU dibawah kendali Abdurrahman Wahid melakukan

safari untuk menjelaskan kepada warga Nahdlatul Ulama apa yang dimaksud dengan kembali kepada Khittah 1926, yang intinya bahwa warga NU tidak lagi wajib memilih PPP dan bebas menentukan aspirasinya dalam pemilu. Pengaruh 'penggembosan' Nahdlatul Ulama atas PPP melalui keputusan kembali ke Khittah 1926 ternyata cukup signifikan. Pada tiga pemilu sebelumnya, suara umat Islam tetap stabil. Pemilu 1971 keempat partai Islam memperoleh suara 27,1% (dua pertiga diantaranya untuk Nahdlatul Ulama), pada tahun 1977 terdapat kenaikan tipis yaitu 27,8%. Namun pada tahun 1987 perolehan PPP turun drastis menjadi 16% (Bruinessen, 1999:141).

Sementara itu secara internal di dalam PBNU sendiri, dampak yang bisa dirasakan adalah terjadinya perlawanan dari kelompok politisi Nahdlatul Ulama, sementara bagi para pendukung Khittah 1926 mempunyai dua tujuan strategis ; disatu sisi dapat membantu mengembalikan otoritas para ulama terhadap pengaruh politikus yang terus membesar, disisi yang lain merupakan cara untuk menggagalkan usaha kaum modernis mendominasi Nahdlatul Ulama (Choiri, 2002:94).

Bagan Dinamika keterlibatan Kiai Pesantren dengan Politik



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji Motif Politik Kiai Pesantren dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Unit analisa penelitian ini adalah individu Elit (Kiai) Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Glenmore di Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan yang dikaji adalah keterlibatan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) baik dalam keterlibatannya

kegiatan politik dalam Pemilu pada tahun 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Pada pengumpulan data dipergunakan beberapa teknik salah satunya adalah wawancara. Mendalam. Wawancara mendalam dilakukan mendalam terhadap para ulama atau Kiai Pesantren. Di samping itu, dilakukan observasi untuk menyajikan gambaran realistik perilaku kiai atau kejadian dalam peran politiknya sebagai Kiai dalam kapasitasnya sebagai warga negara, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Untuk penelitian ini teknik yang dilakukan adalah dokumen. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah fotoo aktivitas Kiai dalam politik bernegara, catatan tertulis hasil wawancara, surat kabar, majalah terkait Peran Politik Kiai yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi subjek dan informan informan kunci yang terlibat langsung dalam konteks politik pada rentang tahun 1999-2009 di Kecamatan Glenmore. Pemilihan ini didasarkan atas peran yang dimainkan informan selama proses politik dalam pemilihan umum tahun 2009. Analisa data yang dilakukan adalah membuat catatan lapangan, membuat catatan penelitian, membuat pengelompokan data, dan membuat tema atau menarik kesimpulan dari hasil temuan-temuan yang ada. Data yang telah dianalisis kemudian di cek absahan dengan menggunakan empat kriteria yang digunakan (Meoleong, 2002: 324) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami motif politik kiai yang dijadikan alasan mereka berpolitik ternyata tidak mudah. Kiai sebagai elite agama biasanya dalam melakukan sebuah tindakan dan keputusan selalu mempertimbangkan banyak aspek. Pertimbangan itu adakalanya bersifat dogmatis yaitu nilai yang bersumber dari pemahaman agama, sosiologi dan bahkan yang bersifat pragmatis.

Teori berfungsi sebagai alat untuk membuat analisis yang sistematis, teori lazim diartikan sebagai serangkaian proposisi yang saling berhubungan dan dapat dipergunakan untuk menerangkan, memprediksi kehidupan sosial. Mengkaji kehidupan sosial tentang manusia ditandai dengan ilmu pengetahuan, perasaan yang terjadi dan berlangsung terus menerus. Kesemuanya membentuk kenyataan hidup dan membuahkan kebudayaan manusia. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk melakukan segala bentuk tindakan yang dipengaruhi oleh respon yang ada diterima. Ekspresi kebebasan tersebut terbentuk oleh hasil pikirannya, perasaannya dan prakarsa yang ingin dicapainya.

Kebebasan menentukan pilihan pada dasarnya merupakan fitrah manusia. Kiai sebagai seorang individu dalam kajian ini, jika dikaitkan dengan tindakannya untuk terjun ke politik. Teori tindakan sosial *Parson (1951)* menyebutkan bahwa perilaku manusia itu adalah subjek yang bertindak secara konkrit dan subjek yang terus menerus dinamis bereaksi diluar struktur yang melingkupinya, maupun dalam nilai-nilai individunya (*The Structure of Social*).

Pilihan untuk berpolitik atau tidak bagi seorang Kiai merupakan pilihan individu kiai yang didasarkan atas internalisasi nilai-nilai keagamaan yang dimilikinya sekaligus dikontektualisasikan dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakatnya. Tidak ada larangan atau anjuran organisasi NU yang menyatakan dengan tegas kondisi-kondisi dimana seorang Kiai harus berpolitik atau tidak. Akan tetapi sikap politik seorang Kiai dalam sejarahnya ada kecenderungan mereka mengikuti sikap politik Nahdlatul Ulama. Artinya meskipun sikap politik atau pilihan mereka berpolitik atau tidak adalah preferensi individu kiai akan tetapi sikap politik Jam'iyah Nahdlatul Ulama digunakan sebagai basis rujukan dari Kiai NU di masing-masing tingkatan.

Sebagai seorang individu yang memiliki banyak peran di masyarakat dan juga merupakan elit di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, seorang Kiai ketika memilih berpolitik atau tidak, sulit dibedakan antara sikap politik dirinya dengan sikap politik yang dari organisasi, apalagi secara kebetulan sikap politik Kiai memiliki sikap politik Kiai-kiai yang lain dengan jumlah yang besar maka sulit dibedakan sikap politik individu Kiai yang bersangkutan dengan sikap politik dari

organisasi. Berkaitan dengan konteks ini seorang Kiai berpolitik tentunya memiliki tujuan, motif yang hanya dirinya dan Allah SWT yang tahu. Tersembunyinya motif dan tujuan tersebut biasanya akan menghasilkan karakter berpolitik yang khas yang merupakan karakter bawaan dari motif dan tujuan mereka berpolitik. Pola ini tergantung dari bentukan dan proses interaksi dalam dirinya sendiri maupun proses interaksi diluar dirinya, Karakter yang berbeda itu selanjutnya dibawa dalam penerapan tindakan untuk menentukan, memilih, menyikapi persoalan-persoalan pribadi dan sosial yang ada. Manusia secara individu, boleh memilih salah satu dari pilihan dalam menentukan alternatif pilihannya (Parson dalam Robert M.Z.Lawang, 1986: 106).

Dari teori tindakan sosial ini dapat dianalisa bahwa pilihan berpolitik bagi seorang Kiai dalam pemilihan umum, sebagaimana diungkapkan oleh para informan adalah sebagai berikut: Kiai berpolitik adalah pilihan pribadi, berpolitik merupakan bagian perjuangan dalam ber *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap politik Kiai adakalanya merupakan cerminan dari sikap politik yang dipilih Jam'iyah Nahdlatul Ulama, pilihan perpolitik merupakan bentuk intepetasi atas dogma agama Islam yang dianut dan kontekstualisasi peran kemasyarakatan Kiai dan pesantren untuk merespon isu-isu kontenporer yang menjadi isu utama dalam masyarakat, dan perbedaan sikap dalam merespon politik adalah sebuah dinamika yang wajar dalam organisasi.

Kiai dalam kapasitasnya sebagai individu dan pimpinan Pondok Pesantren bahkan Pimpinan Organisasi Nahdlatul Ulama jika ditinjau dari perilaku sosialnya, bebas bertindak untuk melakukan pilihan-pilihan atas dirinya sesuai dengan pilihan pribadinya. Kiai memilih untuk berpolitik atau tidak adalah sebuah sikap yang didasari atas motif pribadi ataupun tujuan kelompok. Menurut Max Weber (1986), dinamakan tindakan sosial yang berorientasi tujuan dan motivasi individu menjadi ciri khusus struktur sosial dan bentukan-bentukan sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan bahwa pilihan berpolitik bagi seorang Kiai didorong oleh motif pribadi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hal ini berkaitan dengan proses pemaknaan yang mendalam dalam ajaran agama islam

dan juga berdasarkan relasi Kiai yang bersangkutan dengan lingkungan sosial dimana yang bersangkutan tinggal.

Setiap tindakan yang dilakukan Kiai secara individu maupun kelompok akan menghasilkan karakter yang berbeda sebagai hasil bentukan proses internalisasi dan interaksi sosial yang ada dalam dirinya. Karakter yang berbeda seorang Kiai juga merupakan bagian dari struktur pemahaman seorang Kiai dalam hal agama Islam menjadikan sebuah pola karakter yang berbeda dan unik jika dibandingkan dengan karakter manusia awam. Karakter khas yang berasal dari internalisasi dogma-dogma agama islam yang dimiliki Kiai selanjutnya dibawa dalam penerapan tindakan menentukan, memilih, menyikapi persolan-persolan pribadi dan kelompoknya. Untuk bertindak seorang Kiai biasanya berusaha untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang diinginkan kemudian mencari rujukan-rujukan yang bersifat otoritatif dalam Al Qur'an dan Sunnah, selanjutnya dikaji bagaimana hukum halal haramnya baru kemudian merespon dengantindakan apa yang akan dilakukan.

Dalam pandangan Kiai yang dogmatis berpolitik merupakan tindakan yang sangat mulia sehingga perlucara yang baik pula untuk mencapai tujuan yang dituju atau dalam teori tindakan sosial pola sikap ini merupakan *Zwerk Rational*. Akan tetapi bagi Kiai yang pragmatis bahwa berpolitik yang memiliki tujuan mulia tidak harus dilakukan dengan cara yang baik pula, adakalanya penentuan cara didasarkan berdasarkan cara yang tepat dan cepat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Tindakan ini masih dalam kategori tindakan yang rasional meskipun tidak seideal yang pertama, tindakan ini sering disebut dengan *Wrektrational Action*.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa berpolitik merupakan suatu upaya yang cara memperolehnya dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dikecamatan Glenmore tidak ada seorang Kiai yang bertindak dengan model *Affetual Action* yang artinya tindakan berpolitik adalah sebuah tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan aktor. Kiai sebagai seorang yang memiliki kemampuan spiritual lebih dibanding masyarakat awam akan selalu mendasarkan tindakan yang dilakukan berdasarkan sumber

rujukan yang otoritatif berupa Al Qur'an, Hadits dan juga Ijma'. Dengan demikian pola tindakan yang dilakukan selalu secara ideal masih dalam rangka misi suci untuk beribadah dan perjuangan dakwah agama Islam.

Sikap pragmatis Kiai dalam berpolitik, internalisasi ilmu agama yang dimilikinya masih dipergunakannya sebagai perangkat rasionalitas yang digunakan untuk bertindak. Karena dalam pandangan Parson (1951: 25) tindakan manusia dibedakan dalam dua orientasi penting, yaitu motivasi dan nilai individu yang bertindak, Dengan tujuan untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan. Sedangkan dalam orientasi nilai berhubungan dengan standard-standard yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Standard nilai berupa Al Qur'an dan Hadits merupakan standard nilai yang menjadi pijakan rasional seorang Kiai dalam bertindak, artinya Kiai yang rasional dan Kiai yang pragmatismemiliki motivasi untuk bersikap sesuai Al Qur'an dan Sunnah, dan merupakan pengendali utama atas pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dari sosok K.M. Thohir Achmad yang sangat dogmatis, sebagai seorang politisi seharusnya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat digunakan untuk kepentingan dirinya dan partainya, akan tetapi perasaan yang selalu diawasi oleh Allah SWT, dan teguh dalam memegang sumpah dan janjinya sehingga berusaha bertindak yang tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Sikap teguh pada syariat agama nampaknya adalah pilihan dan mampu mengalahkan dorongan dan motivasi diri sendiri untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya selama mungkin dalam politik.

Seseorang Kiai memilih berpolitik atau tidak berpolitik tergantung pada sistem nilai yang dipegangnya. Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap masyarakat yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis. Dalam konteks ini, keyakinan agama seorang Kiai (antara lain didasari atas pemahaman *fiqh*) akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya. Agama Islam yang produk-produk hukumnya dibahas dalam *fiqh* menjadi sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seorang

muslim, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Pemikiran ini secara teoritis didasarkan pada pendapat Talcott Parson dalam Zubaidi (2007:9) bahwa agama menjadi satu-satunya sistem acuan nilai (*sistem referenced values*) bagi seluruh sistem tindakan (*sistem of actions*).

Secara umum pola sikap yang dimiliki Kiai pada umumnya dalam pandangan teori tindakan sosial terkategori sebagai *Traditional Action* suatu pola tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu dimasa lalu (Ritzer, 2002: 40-41). Dalam kasus Kiai dalam tindakan politiknya yang memiliki corak pemahaman yang diwariskan dari kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Secara tidak sengaja melalui pola pengajaran yang relatif sama maka Kiai memiliki pola tindakan sosial yang hampir sama pula.

Meskipun pola sikap dalam politik masing-masing Kiai didasarkan atas keyakinan yang terdapat dalam dirinya sendiri dan menghasilkan karakter yang berbeda, akan tetapi bentukan sistem pendidikan pesantren tradisional yang telah melembaga sangat kuat secara turun temurun membentuk sikap hidup, dan kepercayaan akan nilai-nilai dan dogma-dogma yang membentuk seorang Kiai dalam corak dan pandangan keagamaannya relatif memiliki kesamaan bentuk. Sehingga pola yang telah mapan ini membentuk Kiai pesantren diseluruh Indonesia untuk bertindak dalam pandangan yang masih merujuk pada organisasi Nahdlatul Ulama dan mampu dipersatukan dalam lembaga yang mewadahi Kiai tradisional dalam cakupan yang besar.

PENUTUP

Tidak terdapatnya kesepakatan mengenai perlu tidaknya Kiai berpolitik. Sebagian Kiai menganggap bahwa Kiai terlibat dalam politik adalah penting dalam upaya untuk memperjuangkan Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah melalui politik kekuasaan, akan tetapi Kiai yang memandang tidak perlu Kiai berpolitik khususnya politik praktis, karena dengan tidak berpolitik Kiai dapat mendakwahkan Islam dengan lebih leluasa tidak terkungkung dengan sekat-sekat kepartaian. Terjadinya keragaman pendapat ini disebabkan oleh pemahaman dan motivasi Kiai dalam

merespon proses politik, karakter Kiai dalam menyikapi proses politik, dan interaksi sosial Kiai dengan lingkungan yang ada pada dirinya.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya Kiai berpolitik, senyatanya Kiai sebagai tokoh yang senantiasa hadir dalam setiap denyut perubahan jaman dan permasalahan masyarakat, selalu bersentuhan dengan kegiatan politik. Berdasarkan deskripsi motif Kiai sebagaimana disampaikan dimuka, tampak motif politik Kiai di Kecamatan Glenmore dalam berpolitik didasari atas motif doktrin keagamaan, kekuasaan, sosial dan motif ekonomi yang dominasi adalah motif pragmatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insana Press.
- Adi Sasono. 1998. *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Maschan Moesa. 2007. *Nasionalisme Kiai (Konstruksi social berbasis Agama)*. Yogyakarta: LKIS.
- Ayu Sutarto. 2005. *Menjadi NU Menjadi Indonesia*. Surabaya: Khalista.
- Hasbullah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Imam Suprayogo. 2007. *Kiai dan Politik, Membaca Citra Politik Kiai*. Malang: UIN Malang Press.
- Khoiro Ummatin. 2002. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laode Ida. 2004. *NU Muda (Kaum Progresif dan sekularisme baru)*. Jakarta: Erlangga.
- Miftah Faridl. 2000. Peran Persepsi Teologis dalam Perilaku Sosial Politik Kyai. (Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Moh. Hasjim. 1992. *Pondok Pesantren berjuang dalam kancah Kemerdekaan dan pembangunan pedesaan*. SinarWijaya, Surabaya.
- Pradjarta Dirdjosanjoto. 1999. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiailanggar di Jawa*. Yogyakarta: LKIS.
- Zamakhsyari Dhofier. 1985. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES.